



Pemerintah Kabupaten Bengkalis  
Dinas Pendidikan Kabupaten  
Bengkalis



# PROFIL

**DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKALIS  
TAHUN 2017**

# KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Yang Maha Kuasa atas perkenan dan hidayah-Nya sehingga film dokumenter “Profil Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis” ini dapat diproduksi sebagai dokumentasi Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis selama tahun 2017 baik kegiatan yang telah dilaksanakan, sedangkan dilaksanakan dan rencana program dan kegiatan dalam kurun waktu 5 tahun ke d e p a n . Profil ini memuat tentang perkembangan Pendidikan sesuai dengan data yang ada baik dari aspek pendidikan maupun aspek non pendidikan. Diharapkan dokumentasi ini juga dapat menjadi salah satu sumber acuan dan pedoman, serta pertimbangan dalam melakukan perencanaan dan evaluasi untuk melaksanakan upaya - upaya peningkatan dan pemerataan kualitas pelayanan pendidikan. Selain menampilkan film dokumenter

berbentuk profil juga dilampirkan buku tentang Rencana Strategi Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 – 2021. Kami mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada semua pihak, khususnya pihak sekolah dan anggota tim produksi Profil Dinas Pendidikan, atas segala dukungan dan partisipasinya dalam membuat dan menyempurnakan dokumentasi ini. Akhir kata semoga film dokumenter Profil Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis Tahun 2017 ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat luas demi peningkatan kualitas pendidikan yang lebih baik dalam rangka menghadapi persaingan global.



Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BENGKALIS

EDI SAKURA, S.Pd., M.Pd  
Pembina/(IV/a)  
NIP.19660514 198811 1 008

***"Tujuan utama pendidikan adalah menciptakan manusia yang bisa melakukan hal baru, tidak sekedar mengulang apa yang telah dilakukan generasi sebelumnya -- Manusia yang kreatif, memiliki daya cipta, memiliki hasrat keingintahuan."***

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara Indonesia yang dijamin undang-undang, untuk itu setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama dan gender, sehingga pemerintah berkewajiban untuk memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

Dalam perencanaan pembangunan di bidang pendidikan seperti perencanaan di tingkat kabupaten/kota diperlukan data dan informasi yang lengkap tidak hanya menyangkut data di lingkungan Dinas Pendidikan melainkan juga di luar Dinas Pendidikan. Untuk mendapatkan data dan informasi, khususnya di luar Dinas Pendidikan diperlukan kerja sama dengan instansi terkait. Agar diperoleh data yang terintegrasi dan lengkap mengenai keadaan pendidikan maka perlu dikaitkan dengan data dan informasi di luar Dinas Pendidikan seperti administrasi pemerintah daerah, demografi, geografi, ekonomi, sosial budaya dan agama serta transportasi dan komunikasi. Selain itu, untuk mengatasi masalah-masalah pendidikan tidak hanya dapat dilakukan melalui faktor internal pendidikan melainkan juga harus dilihat faktor eksternal atau di luar pendidikan.



Untuk mengatasi masalah di atas, Profil Pendidikan yang cukup komprehensif di suatu kabupaten/kota dapat dipandang sebagai bahan masukan untuk penyusunan perencanaan pembangunan pendidikan yang realistis. Oleh karena itu, dengan menggunakan profil pendidikan tersebut dapat diketahui dan diperhitungkan berbagai faktor yang ada dalam suatu wilayah, termasuk faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi perkembangan suatu wilayah khususnya perkembangan pendidikan.

Berdasarkan data dan informasi yang komprehensif yang termuat di dalam profil pendidikan ini dapat dilakukan analisis secara deskriptif untuk mengetahui kinerja pendidikan dasar. Kemudian, dengan menggunakan kinerja yang ada diharapkan dapat dilakukan identifikasi masalah terhadap pemerataan, mutu dan relevansi, serta manajemen pendidikan. Berdasarkan masalah yang ada, maka dilakukan analisis untuk perencanaan dengan pendekatan berdasarkan data dan informasi yang ada.

## **B. Tujuan**

Tujuan umum disusunnya profil pendidikan adalah untuk menghasilkan data dan informasi yang terintegrasi antara data pendidikan dengan data non pendidikan yang dapat digunakan semua pihak yang berkepentingan dengan pembangunan pendidikan.

Tujuan khususnya adalah untuk mengetahui kinerja pendidikan dasar di Kabupaten Bengkulu, masalah yang dihadapi sebagai bahan perencanaan yang menyangkut pemerataan pendidikan, peningkatan mutu dan relevansi pendidikan serta manajemen pendidikan. Setelah diketahui masalah diharapkan dapat disusun cara mengatasi masalah tersebut. Di samping itu, kinerja pendidikan yang dikaitkan dengan faktor eksternal tersebut dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk pengambilan keputusan seperti penyusunan perencanaan pembangunan wilayah, perencanaan pembangunan pendidikan, penyusunan kebijakan operasional pendidikan, dan informasi bagi pihak yang memerlukan, khususnya informasi pendidikan di kabupaten Bengkulu.

## **C. Ruang Lingkup**

Profil ini menyajikan keadaan umum non pendidikan dan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar. Keadaan umum non pendidikan yang disajikan meliputi informasi tentang administrasi pemerintahan daerah, demografi, geografi, ekonomi, sosial budaya dan agama, serta transportasi dan komunikasi. Informasi itu sangat diperlukan dan mempunyai saling keterkaitan yang mendukung perkembangan pendidikan di daerah. Keadaan umum pendidikan mencerminkan variabel-variabel pendidikan menurut jenjang serta kemajuan yang dicapai melalui indikator-indikator pendidikan di setiap jenjang pendidikan.

Sesuai dengan bahan yang tersedia disajikan kinerja dan analisis profil pendidikan yang mencerminkan kaitan antara indikator-indikator internal dan eksternal dengan permasalahannya sehingga diharapkan dapat memberikan informasi untuk keperluan perencanaan. Data yang tersedia disajikan dalam bentuk tabel dan memuat data dasar, (baik yang bersumber dari Pemda, BPS, Dinas Pendidikan maupun dan instansi lain) mengenai pendidikan dan data olahan yang menghasilkan indikator seperti angka, rasio, dan perbandingan pendidikan menurut jenis dan jenjang pendidikan.

## **BAB II**

# **ORGANISASI**

### **A. VISI DAN MISI**

Untuk mendukung visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Bengkalis sebagaimana tersebut diatas, maka dirumuskanlah Visi dan Misi Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis sebagai berikut:

***“Terwujudnya Pendidikan Berdaya Saing Menuju Bengkalis Maju dan Makmur”***

Untuk mewujudkan visi tersebut Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis menetapkan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas Akses Pendidikan;
2. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan berakhlak;
3. Mewujudkan tata kelola pelayanan pendidikan.

### **B. Tugas Pokok dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Organisasi Kabupaten Bengkalis serta Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis.

Dinas Pendidikan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pendidikan serta tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Unsur-Unsur Organisasi Dinas Pendidikan Terdiri dari:

- a. Kepala
- b. Sekretariat, terdiri atas:
  - 1) Sub Bagian Penyusunan Program;
  - 2) Sub Bagian Umumdan Kepegawaian; dan
  - 3) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
- c. Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal;
  - 1) Seksi Kurikulum dan Penilaian;
  - 2) Seksi Kelembagaan Sarana dan Prasarana; dan
  - 3) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter.
- d. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar (SD);
  - 1) Seksi Kurikulum dan Penilaian;

- 2) Seksi Kelembagaan Sarana dan Prasarana; dan
- 3) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter;
- e. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah (SMP);
  - 1) Seksi Kurikulum dan Penilaian;
  - 2) Seksi Kelembagaan Sarana dan Prasarana; dan
  - 3) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter.
- f. Bidang Pembinaan Ketenagaan;
  - 1) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD, dan Pendidikan Non Formal;
  - 2) Seksi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan SD; dan
  - 3) Seksi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan SMP.
- g. Satuan Pendidikan dan;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

## 1. Kepala

Mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pendidikan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, kepala menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan daerah di bidang pembinaan PAUD dan pendidikan non formal, pembinaan SD, pembinaan SMP, pembinaan ketenagaan.
- b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan PAUD dan pendidikan non formal, pembinaan SD, pembinaan SMP, pembinaan ketenagaan.
- c. Pengkoordinasian penyedia infrastruktur dan penduduk di bidang pembinaan PAUD dan pendidikan non formal, pembinaan SD, pembinaan SMP, pembinaan ketenagaan.
- d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pembinaan PAUD dan pendidikan non formal, pembinaan SD, pembinaan SMP, pembinaan ketenagaan.
- e. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang pembinaan PAUD dan pendidikan non formal, pembinaan SD, pembinaan SMP, pembinaan ketenagaan.
- f. Pelaksanaan Administrasi dinas pendidikan, dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati.

## 2. Sekretariat

Mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan, pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian perencanaan, penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan, perlengkapan, umum dan kepegawaian. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sekretaris menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana, program, evaluasi, dan pelaporan.
- b. Pelaksanaan administrasi kepegawaian dan rumah tangga dinas pendidikan.
- c. Pelaksanaan administrasi keuangan dan perlengkapan serta penataan aset.
- d. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi dan hubungan masyarakat.
- e. Pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan hubungan masyarakat.
- f. Pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang, dan
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepaladinas baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya.

### **3. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal**

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, kepala bidang menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.
- b. Pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.
- c. Penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan nonformal.
- d. Penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupansatuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.
- e. Penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.
- f. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.
- g. Pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya.

### **4. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar**



Mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan sekolah dasarsesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, kepala bidang menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar.
- b. Pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar.
- c. Penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal sekolah dasar.
- d. Penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan sekolah dasar.
- e. Penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar.
- f. Penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya dalam daerah kabupaten.
- g. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar.
- h. Pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar.
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

#### **5. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama**

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan Sekolah Menengah Pertama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, kepala bidang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama.
- b. Pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama.
- c. Penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal sekolah menengah pertama.
- d. Penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan sekolah menengah pertama.
- e. Penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama.

- f. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama.
- g. Pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama.
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

#### **6. Bidang Pembinaan Ketenagaan**

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pelaksanaan urusan tugas pembantuan dan perumusan serta pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidikan dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan pendidikan nonformal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, kepala bidang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan bahan pelaksanaan urusan tugas pembantuan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal.
- b. Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal.
- c. Penyusunan bahan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal.
- d. Penyusunan bahan rencana kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal.
- e. Penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal.
- f. Penyusunan bahan rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam kabupaten.
- g. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pendidikan pelaporan di bidang pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal.
- h. Pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal.
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

7. **Jabatan Fungsional**, dengan tugas sesuai peraturan perundang-undangan.

Jabatan fungsional adalah jabatan yang diberikan dan dilaksanakan oleh seseorang berdasarkan pada keahlian tertentu untuk melakukan tugas-tugas tertentu dalam regulasi sistem pendidikan pada setiap jenjang yang menjadi kewenangannya. Jabatan fungsional dibentuk mengandung maksud sebagai berikut:

1. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
2. Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala.
3. Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
4. Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## STRUKTUR ORGANISAS



### C. Sejarah Singkat Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis berdiri pada tahun 2000, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1995 tentang Perluasan dan Pengembangan Wilayah di Kabupaten/ Kota, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Otonomi Daerah) yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, serta dikukuhkan terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Organisasi Kabupaten Bengkalis serta Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis.

Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis dalam otonomi daerah telah terjadi dua (2) kali perubahan nama, diawal otonomi daerah tahun 2000 bernama Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis, dalam di tahun 2003 berubah nama menjadi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, namun ditahun 2007 kembali berpisah urusan Pendidikan dengan Pemuda dan Olahraga sehingga kembali menjadi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

Kedudukan dan alamat Dinas Pendidikan telah berpindah alamat sebanyak dua (2) kali, dimana awalnya Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis beralamatkan di Jalan Sudirman Bengkalis tepatnya disamping Masjid Raya Istiqamah Bengkalis dan saat ini beralamatkan di Jalan Pertanian Bengkalis disamping Polres Bengkalis.

Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis dalam otonomi daerah telah berganti pimpinan beberapa kali, yakni:



1. HADIMIHARJA dari tahun 2000 sampai dengan 2001



2. H. HASRAF SAILI dari tahun 2001 sampai dengan 2008



3. SYA'ARI dari tahun 2008 sampai dengan 2012

4. AZWAR BC HK dari tahun 2012 sampai dengan 2013



5. HERMAN SANI dari tahun 2013 sampai dengan 2016



6. H. ERI INDRA PUTRA dari tahun 2016 sampai dengan 2016



7. EDI SAKURA dari tahun 2016 sampai dengan sekarang

### **BAB III KEADAAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS**

Profil pendidikan pada Bab III keadaan umum dimulai dengan peta Kabupaten Bengkalis yang menggambarkan letak Kabupaten Bengkalis dalam kaitannya dengan lingkungan sekelilingnya. Kemudian, dilanjutkan dengan keadaan non pendidikan yang meliputi enam faktor seperti administrasi pemerintahan daerah, demografi, geografi, ekonomi, sosial budaya, transportasi dan komunikasi. Terakhir dijelaskan tentang keadaan pendidikan yang dimulai dari tingkat PAUD dan PNF, SD sampai tingkat SMP (Sekolah Menengah Pertama).

#### **A. Non Pendidikan**

Keadaan non pendidikan dimasukkan dalam profil pendidikan karena selama ini terdapat kesan bahwa faktor lingkungan sering kurang diperhitungkan dalam perencanaan pendidikan sehingga timbul berbagai masalah, antara lain: (1) input pendidikan kurang dikelola secara optimal dan (2) output pendidikan dianggap kurang sesuai dengan

kebutuhan masyarakat atau kebutuhan lingkungan sehingga belum mampu menunjang pembangunan Nasional. Untuk itu, masalah non pendidikan perlu dikaitkan dengan pendidikan yang ada.

### 1. Administrasi dan Geografi Pemerintah Daerah

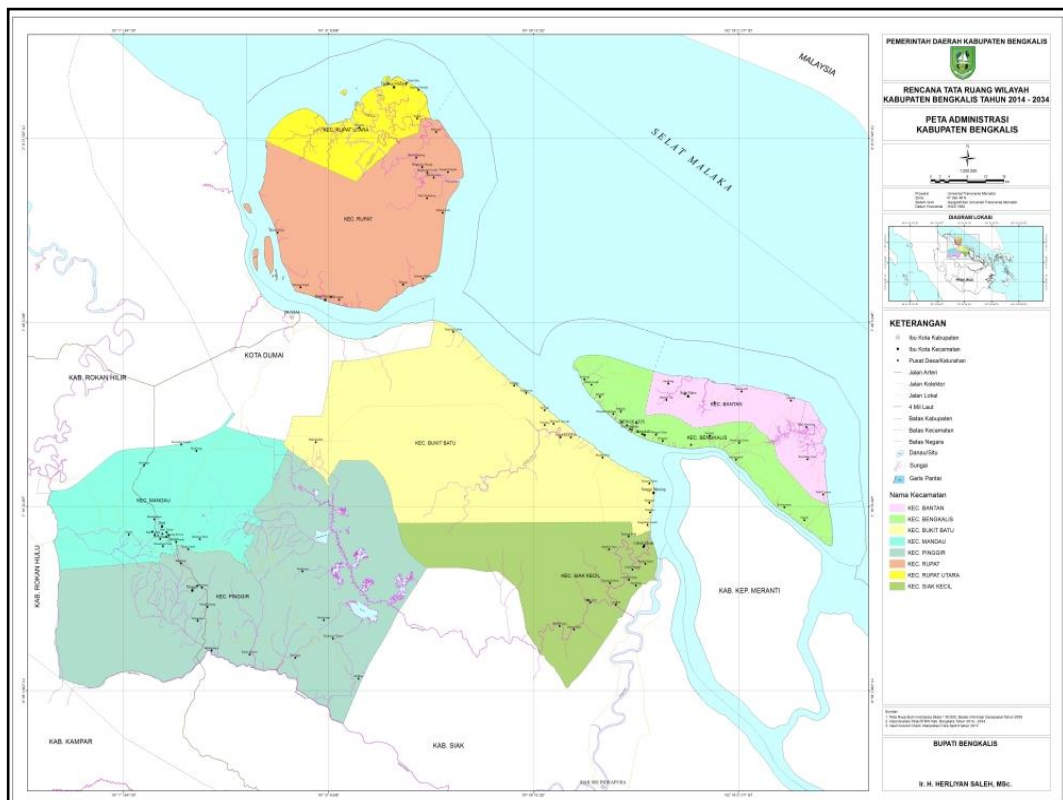
Berdasarkan undang-undang, pendidikan yang diperuntukkan bagi seluruh masyarakat Indonesia dan salah satu tujuannya adalah meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan penduduk secara maksimal. Dengan demikian, penduduk baik sebagai perorangan maupun sebagai kelompok masyarakat merupakan sasaran kegiatan pembangunan pendidikan. Oleh karena itu, aspek-aspek kependudukan, dinamika penduduk dan masalah yang ditemui dalam masyarakat akan sangat mempengaruhi pendidikan. Dengan demikian, aspek kependudukan perlu dipertimbangkan dalam pengembangan pendidikan.

Setelah perang kemerdekaan Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Lembaran Negara Nomor 25 Tahun 1956, ditentukan bahwa Kabupaten Bengkalis dengan ibukotanya Bengkalis dipimpin oleh seorang Bupati Kepala Daerah Tingkat II, yang pada waktu itu masih berada dibawah Provinsi Sumatera Tengah dengan pusat pemerintahan berkedudukan di Padang. Dengan dibentuknya Provinsi Daerah Tingkat I Riau berdasarkan Undang-undang Nomor 61 tahun 1958 tentang Penetapan Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Riau dan Jambi, maka Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis berada dalam Provinsi Daerah Tingkat I Riau.

Kabupaten Bengkalis merupakan wilayah kabupaten yang terluas nomor satu di Provinsi Riau, namun sejalan dengan perkembangan otonomi daerah, sejumlah wilayah yang selama ini merupakan bagian dari Kabupaten Bengkalis satu demi satu dimekarkan. Dimulai pada tahun 1999, berdasarkan Undang-undang Nomor 53 tahun 1999 terbentuklah Kabupaten Siak Sri Indrapura dan Kabupaten Rokan Hilir yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Bengkalis. Selanjutnya pada tahun yang sama melalui Undang-Undang Nomor 16 tahun 1999 dibentuklah Kota Dumai merupakan pemekaran pertama dari Kabupaten Bengkalis dan terakhir berdasarkan Undang-undang Nomor 12 tahun 2009 beberapa kecamatan di Kabupaten Bengkalis dimekarkan menjadi Kabupaten Kepulauan Meranti.

Luas wilayah Kabupaten Bengkalis secara keseluruhan termasuk kawasan perairan di sekitarnya adalah 7.773,93 Km<sup>2</sup> atau setara dengan 777.393 Ha atau sekitar 9,46 % dari wilayah Provinsi Riau yang memiliki luasan 107.932,71 Km<sup>2</sup> atau setara dengan 10.793.271 Ha.

### Peta Batas Administratif Kabupaten Bengkalis



Kabupaten Bengkalis secara administrasi kewilayahan memiliki batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka (dan pantai bagian barat Negara Malaysia).



## TABEL

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Siak
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kota Dumai dan Kabupaten Rokan Hilir.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kepulauan Meranti

Hingga tahun 2016, Kabupaten Bengkalis telah memiliki 8 kecamatan yang terletak di dua pulau, 19 kelurahan dan 136 desa. Kecamatan dengan wilayah terluas adalah Kecamatan Pinggir dengan luasan 2.503,00 Km<sup>2</sup> (250.330 Ha) atau 32,20 % dari luas wilayah Kabupaten Bengkalis dan kecamatan yang paling kecil wilayahnya adalah Kecamatan Bantan dengan luasan 424,40 Km<sup>2</sup> (42.440 Ha) atau 5,46 % dari luas wilayah Kabupaten Bengkalis. Kecamatan dengan kelurahan terbanyak adalah Kecamatan Mandau yang memiliki 9 kelurahan, sedangkan Kecamatan dengan jumlah desa terbanyak adalah Kecamatan Bengkalis yang memiliki 28 desa. Sedangkan jarak terjauh dari Ibu Kota Kecamatan dengan ibu kota Kabupaten Bengkalis adalah ibu kota Kecamatan Mandau yaitu kelurahan Air Jamban Duri dengan jarak lurus 103 km. dan jarak terdekat selain Kecamatan Bengkalis adalah Kecamatan Bantan yaitu di selat Baru dan ibu kota Kecamatan Bukit Batu di Kelurahan Sungai Pakning dengan jarak lurus 15 km. Data sebagaimana disajikan dalam Tabel di bawah ini.

### Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Bengkalis

No.	Kecamatan	Kelurahan	Desa	Luas Wilayah		
				Km <sup>2</sup>	Ha	Persentase

TABEL

No.	Kecamatan	Kelurahan	Desa	Luas Wilayah		
				Km <sup>2</sup>	Ha	Persentase
1.	Mandau	9	14	937,47	93.747	12,06
2.	Pinggir	2	17	2.503,00	250.300	32,20
3.	Bukit Batu	1	16	1.128,00	112.800	14,51
4.	Siak Kecil	-	17	742,21	74.221	9,55
5.	Rupat	4	12	896,35	89.635	11,53
6.	Rupat Utara	-	8	628,50	62.850	8,08
7.	Bengkalis	3	28	514,00	51.400	6,61
8.	Bantan	-	23	424,40	42.440	5,46
<b>Total Keseluruhan</b>		<b>19</b>	<b>136</b>	<b>7.773,93</b>	<b>777.393</b>	<b>100,00</b>

Sumber: BPS Bengkalis, 2016

**Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Bengkalis**

No.	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Jarak Dari Ibu Kota Kabupaten ke Ibu Kota Kecamatan	
			Km <sup>2</sup>	Keterangan
1.	Mandau	Air Jamban	103	
2.	Pinggir	Pinggir	100	
3.	Bukit Batu	Sungai Pakning	15	
4.	Siak Kecil	Lubuk Muda	25	
5.	Rupat	Batu Panjang	71	
6.	Rupat Utara	Tanjung Medang	86	
7.	Bengkalis	Bengkalis	0	Ibu Kota

No.	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Jarak Dari Ibu Kota Kabupaten ke Ibu Kota Kecamatan	
			Km <sup>2</sup>	Keterangan
		Kota		Kabupaten
8.	Bantan	Selat Baru	15	

Sumber: BPS Bengkulu, 2016

Secara astronomis wilayah Kabupaten Bengkulu terletak antara 2°7'37,2" - 0°55'33,6" Lintang Utara dan 100°57'57,6" – 102°30'25,2" Bujur Timur. Wilayah Kabupaten Bengkulu secara umum dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok geografi, yaitu: (1) geografis pulau-pulau pesisir, (2) geografis pesisir dan (3) geografis daratan. Sebagian wilayah Kabupaten Bengkulu berada bersempadan dengan perairan dangkal dan sebagian lagi merupakan terusan dari bentangan daratan Pulau Sumatera bagian tengah dan timur.

Kabupaten Bengkulu yang memiliki geografis pulau-pulau pesisir yaitu Pulau Bengkulu yang terdiri dari Kecamatan Bengkulu dan Kecamatan Bantan dengan luas total daratan dan perairan sekelilingnya sebesar 938 Km<sup>2</sup> atau 93.840 hektar dan Pulau Rupa yang terdiri dari Kecamatan Rupa dan Kecamatan Rupa Utara dengan luas daratan dan perairan sekelilingnya sebesar 62.850 Ha atau 1.524,85 Km<sup>2</sup>, dimana Pulau Rupa memiliki 15 buah pulau-pulau kecil yang telah memiliki nama dengan karakteristik merupakan endapan-endapan geologis hasil dinamika arus dan angin di perairan sekitarnya. Ke-15 pulau-pulau kecil tersebut adalah gugus pulau-pulau yang terdapat di utara Kecamatan Rupa Utara yaitu: 1) Pulau Atung; 2) Pulau Mampu Beso; 3) Pulau Payung; 4) Pulau Mentele; 5) Pulau Baru; 6) Pulau Rampang; 7) Pulau Mampu Kecil; dan 8) Pulau Ketam. Kemudian gugus pulau-pulau yang berada di bagian barat Kecamatan Rupa yang terdiri dari: 9) Pulau Babi; 10) Pulau Kemunting; 11) Pulau Simpung; 12) Pulau Beting Aceh; 13) Pulau Beruk; 14) Pulau Pajak dan 15) Pulau Tengah.

Namun di tahun 2017 Kabupaten Bengkulu menjadi 11 Kecamatan, dimana Kecamatan Bukit Batu, Kecamatan Mandau, dan Kecamatan Pinggir dimekarkan, sehingga menjadi:

1. Kecamatan Mandau

2. Kecamatan Bathin Solapan
3. Kecamatan Pinggir
4. Kecamatan Tualang Mandau
5. Kecamatan Rupert
6. Kecamatan Rupert Utara
7. Kecamatan Bukit Batu
8. Kecamatan Bandar Laksamana
9. Kecamatan Siak Kecil
10. Kecamatan Bantan
11. Kecamatan Bengkalis

## 2. Demografi Kabupaten Bengkalis

Penduduk Kabupaten Bengkalis pada umumnya bersifat cukup majemuk dari berbagai suku pendatang yang memasuki Kabupaten Bengkalis dari masa ke masa. Kemajemukan ini dapat terlihat di pusat-pusat perkotaan dan daerah-daerah pertumbuhan baru. Suku Melayu tersebar di Pulau Bengkalis, Pulau Rupert, Kecamatan Bukit Batu dan Siak Kecil. Selain itu, dalam jumlah yang tidak begitu besar berada di Kecamatan Mandau dan Pinggir. Suku-suku pendatang yang terdiri dari Suku Jawa, Minangkabau, Batak, Kampar, Bugis, Makassar, Aceh, Tionghoa dan suku-suku lainnya datang ke Kabupaten Bengkalis dari berbagai periode sejalan dengan perkembangan pembangunan di Kabupaten Bengkalis. Penduduk asli di Kabupaten Bengkalis terdiri dari Suku Melayu Asli (asal) yang diperkirakan dari Gasib lama (Kabupaten Siak sekarang) khususnya dari muara Sungai Siak dan Sei Apit kemudian menempati Pulau Bengkalis dan Pulau Rupert. Suku Akit yang diperkirakan berasal dari Bhurma (atau Myanmar sekarang) dan Muangthai (atau Thailand sekarang) kemudian menempati Pulau Bengkalis dan Pulau Rupert. Sedangkan Suku Sakai yang diperkirakan berasal dari Gasib lama dan Pagaruyung kemudian bertempat mulai dari Kecamatan Mandau hingga bagian utara dari Kabupaten Siak dimana Suku Sakai ini pada awalnya hidup di daerah-daerah pedalaman dan pinggiran sungai, kemudian

TABEL

pada masa sekarang telah berinteraksi dengan pembangunan di wilayah tersebut.

Berdasarkan tabel di bawah ini, hingga dengan tahun 2016 jumlah penduduk di Kabupaten Bengkalis berjumlah 543.987 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk dalam kurun waktu lima tahun 1,67 %. Kecamatan yang memiliki tingkat kepadatan penduduk terbesar di Kabupaten Bengkalis berada di Kecamatan Mandau dan Kecamatan Bengkalis sedangkan kecamatan yang memiliki tingkat kepadatan penduduk yang masih kecil berada di Kecamatan Rukat Utara.

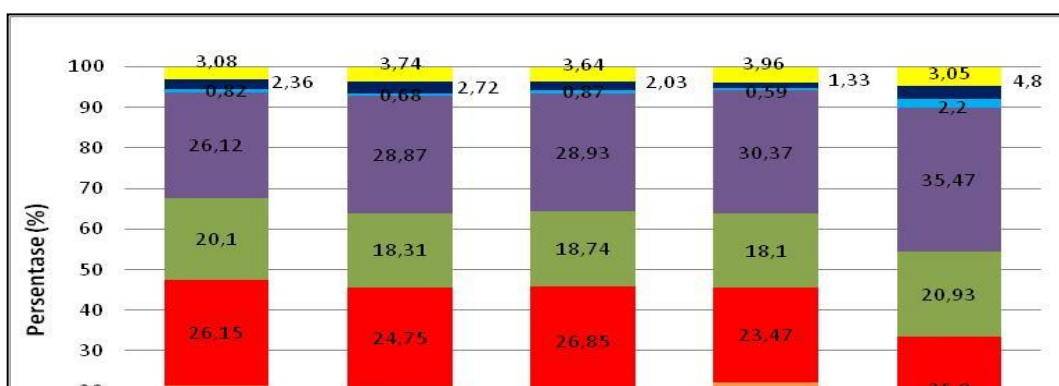
*Tabel*

**Jumlah Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Bengkalis 2011-2016**

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )	Jumlah Penduduk (jiwa)					Kepadatan Penduduk 2015 (jiwa/km <sup>2</sup> )
			2011	2012	2013	2014	2015	
1.	Mandau	937,47	227.272	233.394	239.361	236.032	239.513	255,00
2.	Pinggir	2.503,00	83.761	88.358	93.084	85.105	86.535	35,00
3.	Bukit Batu	1.128,00	31.256	32.123	32.970	32.376	32.840	29,00
4.	Siak Kecil	742,21	19.158	19.463	19.747	19.965	20.220	27,00
5.	Rukat	896,35	31.114	31.456	31.759	32.638	33.063	37,00
6.	Rukat Utara	628,50	13.432	13.737	14.030	13.999	14.201	23,00
7.	Bengkalis	514,00	73.940	75.101	76.180	77.488	78.571	153,00
8.	Bantan	424,40	36.415	36.559	36.655	38.535	39.044	92,00
<b>Total Keseluruhan</b>		<b>7.773,93</b>	<b>516.348</b>	<b>530.191</b>	<b>543.786</b>	<b>536.138</b>	<b>543.987</b>	<b>70,00</b>
<b>Laju Pertumbuhan (%)</b>			<b>1,67</b>					

**Gambar**

**Grafik Komposisi Penduduk Berdasarkan Ijazah Tertinggi Kabupaten Bengkalis Tahun 2011 – 2016**



*Sumber: BPS Bengkalis, 2016*

Berdasarkan grafik pada gambar di atas, dapat dijelaskan bahwa upaya peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Bengkalis dari tahun ke tahun sudah menunjukkan adanya perkembangan ke arah yang baik. Upaya tersebut terlihat pada tahun 2015 terjadi peningkatan komposisi penduduk yang memiliki ijazah SMA sederajat (termasuk yang memiliki ijazah SMK) dan Diploma III jika dibandingkan dengan tahun 2011 sebagai akibat keberadaan pendidikan tinggi di Kabupaten Bengkalis. Begitu juga penduduk yang tidak mempunyai ijazah terjadi tren penurunan yang diindikasikan adanya intervensi pemerintah melalui program wajib belajar sembilan tahun dan kejar paket sehingga terjadi peningkatan penduduk yang memiliki ijazah SD pada tahun 2015.

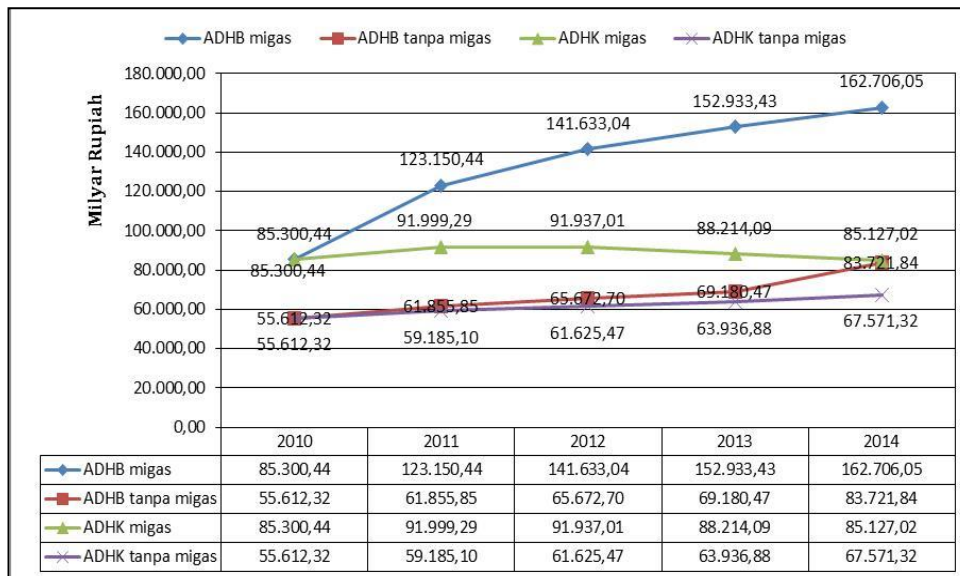
Untuk penduduk berijazah SMP sederajat mengalami kecenderungan menurun di tahun 2014 jika dibandingkan dengan tahun 2010, hal ini mengindikasikan upaya Pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk menyerap lulusan SMP sederajat ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi baik melalui program pendidikan menengah dan pendidikan luar sekolah sudah cukup baik.

### **3. Ekonomi**

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro adalah data produk domestik regional bruto (PDRB).

Terdapat 2 (dua) jenis penilaian PDRB yaitu atas dasar harga berlaku (ADHB) dan atas dasar harga konstan (ADHK). Perkembangan PDRB ADHB dan ADHK Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada gambar berikut ini:

**Gambar**  
**Grafik Perkembangan PDRB ADHB dan PDRB ADHK**  
**Kabupaten Bengkalis 2010-2014**



Sumber : BPS Bengkalis, 2015

Berdasarkan gambar di atas menunjukkan PDRB ADHB tanpa minyak bumi dan gas Kabupaten Bengkalis mengalami tren kenaikan yaitu yang semula Rp 85,3 trilyun pada tahun 2010 menjadi Rp 162,7 trilyun pada tahun 2014, sedangkan PDRB ADHK minyak bumi dan gas Kabupaten Bengkalis justru mengalami tren menurun yaitu semula Rp. 85,3 trilyun pada tahun 2010 menjadi Rp. 85,12 trilyun pada tahun 2014. Untuk PDRB ADHB tanpa minyak bumi dan gas Kabupaten Bengkalis juga mengalami tren kenaikan sekalipun tidak setajam pada ADHB minyak bumi dan gas yaitu yang semula Rp. 55,61 trilyun pada tahun 2010 menjadi Rp.83,72 trilyun pada tahun 2014, sedangkan PDRB ADHK tanpa minyak bumi dan gas mengalami tren cenderung datar dengan peningkatan yang cukup kecil yaitu Rp. 55,61 trilyun pada tahun 2010 menjadi 67,57 trilyun pada tahun 2014.

Sektor Pertambangan dan Penggalan masih berperan besar sebagai penyumbang PDRB di Kabupaten Bengkalis. Selanjutnya sektor yang

**TABEL**

berperan dengan komposisi yang cukup besar secara berurutan adalah: Industri Pengolahan, Pertanian; Kehutanan dan Perikanan, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, dan serta Konstruksi.

Kondisi kemiskinan makro di Kabupaten Bengkalis dalam rentang enam tahun (2010 - 2015) diperlihatkan pada tabel bawah ini:

**Tabel**  
**Indikator Kemiskinan Makro Daerah**

INDIKATOR	2010	2011	2012	2013	2014	2015*
Garis Kemiskinan (000) (Rp.)	325,48	349,77	367,74	388,67	409,95	-
Jumlah Penduduk Miskin (000) jiwa	41,1	35	35,7	40,1	38,8	40
Tingkat Kemiskinan Po (%)	8,25	6,72	6,76	7,57	7,20	7,38
Tingkat Kedalaman Kemiskinan P1 (%)	1,70	0,7	0,98	0,84	1,06	-
Tingkat Keparahan Kemiskinan P2 (%)	0,52	0,14	0,23	0,15	0,24	-

Sumber: BPS pusat, 2015; \*Angka sementara

Berdasarkan kepada tabel di atas, garis kemiskinan sebagai akibat perkembangan inflasi dan PDRB per kapita mengalami tren peningkatan dari tahun ke tahun dengan rata-rata peningkatan sebesar Rp. 6,76,-/tahun. Tren peningkatan garis kemiskinan ini menyebabkan bertambah pula jumlah penduduk di Kabupaten Bengkalis yang berkategori miskin, sehingga secara makro tingkat kemiskinan di Kabupaten Bengkalis mengalami peningkatan pula.

Sedangkan tingkat kedalaman dan tingkat keparahan kemiskinan yang mengindikasikan adanya kondisi kemelaratan penduduk miskin di Kabupaten Bengkalis. Tingkat kedalaman kemiskinan menunjukkan tren penurunan yang sebelumnya tingkat kedalaman kemiskinan tahun 2010 sebesar 1,70 % menurun menjadi 1,06 % di tahun 2014. Tingkat keparahan juga menunjukkan adanya tren penurunan dimana pada tahun 2010 tingkat keparahan kemiskinan sebesar 0,35 % menurun menjadi 0,24 % di tahun 2014. Perkembangan kedua indikator ini mengindikasikan adanya perbaikan



**TABEL**

kesejahteraan sosial di kelompok masyarakat miskin yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis baik melalui program penanggulangan kemiskinan dari pusat di daerah, maupun program yang diarahkan untuk menurunkan tingkat kemelaratan kelompok penduduk miskin.

**B. Pendidikan**

Kemajuan pendidikan di Kabupaten Bengkalis cukup menggembirakan. Pelaksanaan program pembangunan pendidikan di daerah ini telah menyebabkan makin berkembangnya suasana belajar mengajar di berbagai jenis dan jenjang pendidikan. Dengan dilaksanakannya program pembangunan, pelayanan pendidikan telah dapat menjangkau daerah terpencil, daerah dengan penduduk miskin, dan daerah jarang dengan dibangunnya sekolah di daerah-daerah tersebut. Secara rinci, pembangunan di setiap jenjang pendidikan tidak sama, oleh karena itu, akan dijelaskan tentang keadaan TK+RA, tingkat SD, tingkat SMP.

**1. KEADAAN UMUM TK/RA 2016/2017**

No.	Komponen	TK	%	RA/BA	%	TK+RA/BA
1.	Sekolah	189		36		
	a. Negeri	5				
	b. Swasta	184		36		
2.	Siswa	7968				
	a. Negeri	477				
	b. Swasta	7491				
	c. Kelompok A					
	d. Kelompok B					
	e. Laki-laki	4033				
	f. Perempuan	3934				
3.	Lulusan					
	a. Laki-laki					
	b. Perempuan					
4.	Kelas	484				
5.	Ruang Kelas	484				
	a. Baik	163				
	b. Rusak ringan	268				
	c. Rusak berat	53				

TABEL

6.	Guru	952				
	a. Laki-laki	35				
	b. Perempuan	917				
7.	Fasilitas Sekolah					
	a. Perpustakaan	12				
	b. Toilet	253				
	c. Air Bersih					
	d. Listrik	96				

Berdasarkan data yang ada pada tahun 2016/2017 jumlah TK dan RA/BA sebanyak ..... dengan rincian negeri sebesar .... dan swasta sebesar ..... Hal ini disebabkan karena TK dan RA/BA lebih banyak dibangun oleh yayasan swasta. Jumlah siswa TK dan RA/BA sebesar .... dengan rincian di negeri sebesar .... dan swasta ..... Bila dirinci menurut kelompok maka siswa kelompok A sebesar .... dan kelompok B sebesar .... Berdasarkan jenis kelamin, siswa laki-laki sebesar .... (... persen) dan perempuan sebesar .... (...persen) dan lulusan TK dan RA/BA sebesar ..... Sedangkan guru TK dan RA/BA sebesar ....orang. Untuk menampung sejumlah siswa tersebut, tersedia ruang kelas TK dan RA/BA sebanyak .... dengan rincian .... Memiliki kondisi baik, ... kondisi rusak ringan, dan .... kondisi rusak berat dengan jumlah kelas/rombel sebesar ..... Guru yang mengajar di TK dan RA/BA sebanyak .... di antaranya yaitu sebanyak .... (...persen) adalah laki-laki dan ....(...persen) adalah perempuan. Untuk menunjang kegiatan belajar mengajar di TK dan RA/BA terdapat fasilitas perpustakaan sebesar ....., toilet sebanyak .... Bila dilihat menurut TK dan RA/BA maka jumlah sekolah TK sebesar .....lebih banyak daripada RA/BA sebesar ..... Hal ini mengakibatkan jumlah siswa TK sebesar .....Juga lebih banyak daripada siswa RA/BA sebesar ..... Jumlah guru TK sebanyak ....dengan ruang kelas TK sebesar .... Sedangkan fasilitas sekolah TK adalah perpustakaan sebesar ....., toilet sebesar .... air bersih sebesar .... Dan listrik sebesar .....

**2. Keadaan Umum SD/MI**

No.	Komponen	SD	MI	SD+MI
1.	Sekolah	340	21	
	a. Negeri	305	1	
	b. Swasta	35	20	
	c. Akreditasi A	37		
	d. Akreditasi B	169		

TABEL

	e. Akreditasi C	91		
2.	Siswa Baru Tk. I	12846		
	a. TK/RA			
	b. RT			
3.	Siswa	76543		
	a. Negeri	67311		
	b. Swasta	9232		
	c. Laki-laki	39939		
	d. Perempuan	36604		
	e. <7 tahun	574		
	f. 7-12 tahun	70221		
	g. >12 tahun	5748		
4.	Kelas	2983		
5.	Rata2 UASBN			
6.	Lulusan	12358		
7.	Guru	4716		
	a. Di bawah S1	560		
	b. S1 ke atas	4156		
8.	Ruang Kelas	2983		
	a. Baik	879		
	b. Rusak Ringan	1692		
	c. Rusak Berat	412		
9.	Fasilitas			
	a. Perpustakaan	371		
	b. UKS			
	c. Tempat Ibadah			
	d. Toilet			
	e. Air Bersih	49		
	f. Listrik	330		

Berdasarkan data yang ada pada tahun 2016/2017 jumlah SD dan MI sebanyak .... dengan rincian negeri sebesar .... Dan swasta sebesar ....., Hal ini disebabkan karena banyaknya SD Negeri yang dibangun melalui program Pemerintah. Jumlah siswa baru tingkat I SD dan MI sebesar .... dengan rincian dari Tk/RA/BA sebesar .... dan dari rumah tangga sebesar .....

## TABEL

Jumlah siswa SD dan MI seluruhnya sebesar ... dengan rincian negeri sebesar .... dan swasta sebesar .... Berdasarkan jenis kelamin maka jumlah laki-laki sebesar ... Dan perempuan sebesar .... Bila dirinci menurut usia maka usia <7 tahun sebesar ....., 7-12 tahun sebesar ....., dan <12 tahun sebesar ..... Jumlah kelas SD dan MI sebesar ..... Rata-rata UASBN SD dan MI adalah .....sedangkan lulusan sebesar .....

Guru yang mengajar di SD dan MI sebanyak ..., di antaranya yaitu sebanyak .... (... persen) adalah berijazah di bawah S1, dan .... (... persen) adalah S1 ke atas. Untuk menampung sejumlah siswa SD dan MI tersebut, tersedia ruang kelas sebanyak ..... dengan rincian .... Memiliki kondisi baik, .... kondisi rusak ringan, dan ..... kondisi rusak berat. Untuk menunjang kegiatan belajar mengajar di SD dan MI terdapat fasilitas perpustakaan sebesar ....., lapangan olahraga sebesar ....., ruang UKS sebesar ....tempat ibadah sebesar ....., toilet sebesar .....

Bila dilihat SD dan MI dapat digambarkan pula bahwa jumlah SD lebih besar jika dibandingkan dengan MI, hal ini terlihat di semua data yang ada. Jumlah SD sebesar ..... dengan jumlah siswa sebanyak .... dan ruang kelas sebesar .... dan ditangani oleh guru sebanyak .....

Selain itu, terdapat pula perpustakaan sebesar ....., lapangan olahraga sebesar ....., ruang UKS sebesar ...., tempat ibadah sebesar ...., toilet sebesar ....air bersih sebesar .... Dan listrik sebesar .....

Bila dilihat menurut status sekolah, jumlah sekolah negeri lebih banyak di SD jika dibandingkan dengan MI. Sebaliknya, jumlah sekolah swasta lebih banyak di MI jika dibandingkan dengan SD. Hal ini disebabkan karena MI lebih banyak dibangun oleh yayasan swasta sedangkan SD lebih banyak dibangun oleh pemerintah melalui program bantuan pembangunan sekolah dasar yang lebih dikenal dengan SD Inpres pada tahun 1973/1974 sampai tahun 1983/1984.

## TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP DAN MTS)

TABEL 10 DATA SMP/MTS – 2012

No.	Komponen	SMP *	MTs	SMP+MTs
1.	Sekolah	98	53	
	a. Negeri	75	3	
	b. Swasta	23	50	
	c. Akreditasi A	33		
	d. Akreditasi B	34		
	e. Akreditasi C	18		
2.	Siswa Baru Tk. I **	9123		
	a. Laki-laki	4699		
	b. Perempuan	4424		
3.	Siswa	27398		
	a. Negeri	23670		
	b. Swasta	3728		

TABEL

	c. Laki-laki	13955		
	d. Perempuan	13443		
	e. <13 tahun	5697		
	f. 13-15 tahun	20385		
	g. >15 tahun	1316		
4.	Kelas	1046		
5.	Rata2 UN			
6.	Lulusan	8440		
7.	Guru	1766	672	
	a. Di bawah S1	129	522	
	b. S1 ke atas	1637	150	
8.	Ruang Kelas	1046		
	a. Baik	290		
	b. Rusak Ringan	645		
	c. Rusak Berat	111		
9.	Fasilitas			
	a. Perpustakaan	81		
	b. Lapangan olahraga	98		
	c. UKS	39		
	d. Laboratorium	125		
	e. Tempat Ibadah			
	f. Toilet	335		
	g. Air Bersih	98		
	h. Listrik			

Keterangan :

\* Tidak Termasuk SMP Terbuka

\*\* Termasuk SMP Terbuka

Berdasarkan data yang ada pada tahun 2016/2017 jumlah SMP dan MTs sebanyak ..... Dengan rincian negeri sebanyak ... dan swasta sebanyak ..... Dilihat dari akreditasi sekolah sebanyak .... telah terakreditasi A, .... terakreditasi B, dan .... terakreditasi C. Jumlah siswa baru tingkat I SMP dan MTs sebesar .... Dengan rincian laki-laki sebesar .... dan perempuan sebesar ..... Jumlah siswa SMP dan MTS seluruhnya sebesar .... dengan rincian negeri sebesar ... dan swasta sebesar ... . Berdasarkan jenis kelamin maka terdapat siswa laki-laki sebesar ...

dan perempuan sebesar ..... Bila dirinci menurut usia sekolah maka siswa <13 tahun sebesar ..... (.... persen), 13-15 tahun sebesar .... (.... persen), dan >15 tahun sebesar .... (.... persen.) Jumlah kelas sebesar .... Dan rata-rata UN SMP dan MTS adalah ..... dan lulusan SMP dan MTs sebesar ..... Guru yang mengajar di SMP dan MTS sebanyak .... di antaranya yaitu memiliki kualifikasi S1 ke atas sebesar ..... (.... persen) dan memiliki kualifikasi S1 ke bawah sebesar .... (..... persen).

Untuk menampung sejumlah siswa tersebut, tersedia ruang kelas sebanyak .... dengan rincian .... memiliki kondisi baik, .... dengan kondisi rusak ringan, dan ..... kondisi rusak berat dengan jumlah kelas sebesar ..... Untuk menunjang kegiatan belajar mengajar di SMP dan MTS terdapat fasilitas perpustakaan sebesar ....., lapangan olahraga sebesar ....., ruang UKS sebesar .... Dan laboratorium sebesar ....., tempat ibadah sebesar .... toilet sebesar ..... air bersih .... dan listrik .....

Bila dilihat SMP dan MTs dapat digambarkan pula bahwa jumlah SMP lebih besar jika dibandingkan dengan MTs. Jumlah SMP sebesar .... dengan jumlah siswa sebanyak ..... dan ruang kelas sebesar ..... dan ditangani oleh guru sebanyak ..... Selain itu, terdapat pula perpustakaan sebesar ....., lapangan olahraga sebesar ....., ruang UKS sebesar .... laboratorium sebesar ..... tempat ibadah sebesar ..... toilet sebesar .... air bersih sebesar .... Dan listrik sebesar .....

Bila dilihat menurut status sekolah, jumlah sekolah negeri lebih banyak di SMP jika dibandingkan dengan MTs. Sebaliknya, jumlah madrasah swasta lebih banyak di MTs jika dibandingkan dengan SMP. Hal ini disebabkan karena SMP lebih banyak dibangun dengan adanya wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun.

## 1. **BAB IV KINERJA PENDIDIKAN**

Dipandang dari pilar kebijakan pendidikan, yaitu pemerataan dan perluasan ada Bab IV kinerja pendidikan dasar dan menengah dimulai dengan kinerja akses pendidikan, dilanjutkan dengan peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan diakhiri dengan efisiensi internal pendidikan. Ketiga kinerja tersebut diterapkan pada setiap jenjang pendidikan, yaitu TK/RA/BA, tingkat SD, SMP, dan SM, sedangkan untuk relevansi hanya dilihat pada SMA dan SMK.

### ***A. PEMERATAAN DAN PERLUASAN AKSES PENDIDIKAN***

**TABEL**

Berdasarkan APK yang ada, ternyata APK tertinggi terdapat di tingkat SD+MI yaitu ... persen dan yang terendah di tingkat PAUD yaitu ....persen. Bila dirinci menurut jenis kelamin, APK laki-laki lebih besar jika dibandingkan dengan APK perempuan. APK laki-laki terbesar pada jenjang SD+MI Dan terendah pada jenjang PAUD. Tingginya APK adalah akibat banyaknya siswa usia di luar usia sekolah yang berada di jenjang tersebut. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tingkat SD+MI mempunyai APK yang terbaik dibandingkan dengan tingkat PAUD dan tingkat TK/RA. Di Kabupaten Tangerang anak yang bersekolah di tingkat SD+MI paling banyak dibandingkan dengan tingkat lainnya.

**TABEL****INDIKATOR PENDIDIKAN**

No.	Indikator	PAUD	SD+MI	SMP+MTs
1.	APK			
	a. laki-laki	25,38	116,63	80,39
	b. perempuan	26,61	113,34	83,85
2.	APM		105,53	61,5
3.	Perbandingan Antarjenjang			
4.	Rasio			
	a. Siswa Peremp. thd Laki <sup>2</sup>	1:2	1;2	1;2
	b. Siswa/Sekolah	162:1	195:1	330:1
	c. Siswa/Kelas	63:1	22:1	32:1
	d. Siswa/Guru	32:1	14:1	19:1
	e. Kelas/R.Kelas Milik			
	f. Kelas/Guru	2:1	2:1	2:1
5.	Angka Masukan/Melanjutkan			
6.	% Siswa swasta	94,01	13,72	11,07
7.	% Guru perempuan	96,32	77,71	76,56

APM yang tertinggi terdapat di tingkat SD/MI yaitu .... persen dan yang terendah di tingkat TK/RA yaitu ....persen. Berdasarkan APM dapat diketahui bahwa pada tingkat SD+MI Anak usia sekolah yang bersekolah lebih banyak dibandingkan dengan tingkat lainnya. Hal itu juga menunjukkan partisipasi yang paling baik terdapat di tingkat SD+MI .

Bila sekolah antarjenjang dibandingkan, maka makin tinggi jenjang sekolah makin kurang jumlahnya, hal itu ditunjukkan dari jumlah tingkat SMP berbanding tingkat SD sebesar ..... Makin sedikitnya jumlah sekolah di jenjang yang makin tinggi menunjukkan makin kurangnya jumlah sekolah yang diperlukan di daerah tersebut.

Indikator berikutnya membicarakan tentang rasio siswa perempuan terhadap lakilaki, rasio siswa per sekolah, siswa per kelas, siswa per guru, kelas per ruang kelas dan kelas per guru. Rasio siswa perempuan terhadap laki-laki terbesar adalah pada jenjang SMP+MTs.

Rasio siswa per guru juga bervariasi dengan rasio terbesar terdapat pada tingkat SD+MI yaitu ..... Besarnya rasio siswa per guru ini menunjukkan kurangnya guru di tingkat tersebut. Sebaliknya, rasio terkecil menunjukkan cukupnya guru di tingkat tersebut. Ruang kelas yang paling sering digunakan adalah pada tingkat SD+MI yaitu sebesar ..... Hal itu berarti, bahwa pada tingkat tersebut masih memerlukan ruang kelas tambahan jika diharapkan jumlah ruang kelas sama dengan jumlah kelas sehingga tidak ada ruang kelas yang digunakan lebih dari sekali.

Angka masukan ke TK+RA sebesar ..... % ternyata lebih kecil daripada ke SD/MI. Sejalan dengan perbandingan antara sekolah di tingkat SMP dan SD yang cukup tinggi maka angka melanjutkan ke tingkat SMP juga cukup tinggi yaitu .....% Diharapkan bila jumlah tingkat SMP ditingkatkan maka angka melanjutkan juga akan meningkat.

Bila dilihat partisipasi siswa swasta ternyata yang terbesar, yaitu ....% adalah pada jenjang TK+RA Dan terkecil, yaitu ....% pada jenjang SD+MI. Khusus untuk guru perempuan ternyata partisipasi yang terbesar, yaitu 96,86 % pada jenjang TK+RA.

## **B. PENINGKATAN MUTU, RELEVANSI, DAYA SAING PENDIDIKAN**

Indikator mutu dapat dibedakan menjadi lima jenis indikator mutu, yaitu 1) mutu masukan, 2) mutu proses, 3) mutu SDM, 4) mutu fasilitas, dan 5) biaya. Khusus untuk TK/RA/BA maka hanya menggunakan mutu SDM dan mutu fasilitas karena disesuaikan dengan data yang tersedia. Untuk jenjang pendidikan lainnya digunakan kelima indikator mutu yang disebutkan di atas.

Berdasarkan mutu masukan dapat diketahui bahwa siswa baru tingkat I untuk tingkat SD adalah berasal dari tamatan TK/RA/BA atau sejenis sebesar ....%. Bila dilihat dari akreditasi sekolah maka akreditasi A terbesar ...% pada jenjang SMP+MTs. Selanjutnya, sekolah dengan akreditasi B terbesar ....% pada jenjang SD+MI, sedangkan akreditasi C terbesar ....% pada jenjang .... dan terkecil .... % pada jenjang .....

Berdasarkan indikator mutu proses, yaitu angka mengulang dan angka putus sekolah ternyata angka mengulang terbesar terdapat pada jenjang ..... yaitu sebesar ....persen dan terendah terdapat pada tingkat ... yaitu sebesar ...persen. Selanjutnya angka putus sekolah terbesar terdapat pada tingkat ... yaitu sebesar ... persen dan terendah terdapat pada tingkat .... yaitu sebesar .....persen.

Berdasarkan indikator output, yaitu rata-rata UASBN atau UN dan angka lulusan ternyata nilai ujian terbesar pada jenjang .... Sebesar .... dan terkecil pada jenjang .... Sebesar ..... Angka lulusan tertinggi terdapat pada tingkat SD+MI yaitu sebesar 100 persen dan terendah terdapat pada tingkat .... yaitu sebesar ....persen.

Bila dilihat dari mutu SDM (guru), maka persentase guru yang layak mengajar atau yang berijazah S1 ke atas terbesar adalah pada jenjang ... yaitu .....persen dan yang terendah adalah pada jenjang .... yaitu ....persen. Guru layak mengajar laki-laki terbesar pada jenjang ... sebesar ... % dan terendah pada jenjang .... sebesar ... %. Mutu guru juga terlihat pada bidang studi yang diajarkan. Khusus SMP, banyaknya guru bidang studi terbesar pada Bidang Studi IPA , yaitu sebesar ... persen dan terkecil bidang studi BP yaitu sebesar ...%,.

Indikator berikutnya adalah tentang mutu prasarana dan sarana pendidikan. Ruang kelas dengan kondisi baik paling banyak terdapat pada jenjang .... yaitu sebesar .... persen sedangkan kondisi rusak berat yang paling banyak terdapat pada tingkat .... yaitu sebesar .... persen. Banyaknya ruang kelas yang rusak berat ini menunjukkan mutu prasarana yang buruk dan berakibat secara tidak langsung akan menurunkan mutu sekolah.

Indikator mutu prasarana lainnya adalah ketersediaan fasilitas sekolah yang ada. Jumlah sekolah yang memiliki perpustakaan terbesar ada pada jenjang .... yaitu sebesar ....persen dan



**TABEL**

terendah ada pada tingkat .... sebesar ....persen. Jumlah lapangan olahraga terbesar pada jenjang .... yaitu sebesar ....persen dan terendah ada pada tingkat .... sebesar ... persen. Fasilitas sekolah lainnya yaitu ruang UKS terbesar terdapat pada jenjang .... yaitu sebesar ... persen. Fasilitas tempat ibadah terbesar pada jenjang .... Sebesar ... persen dan terkecil pada jenjang ... sebesar ... persen. Fasilitas toilet dan air bersih yang seharusnya ada pada setiap jenjang pendidikan ternyata terbesar pada jenjang .... sebesar ....% dan terkecil pada jenjang ..... sebesar .....%.

Indikator mutu yang ditunjukkan dari biaya dilihat dari angka partisipasi pemerintah pusat, yayasan, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan orang tua siswa. Dari kelima partisipasi dalam hal biaya tersebut, angka partisipasi terbesar adalah pada Pemerintah Daerah dengan persentase terbesar pada jenjang SD dan terkecil adalah Yayasan Pada jenjang TK+RA/BA.

**TABEL**

**INDIKATOR MUTU PENDIDIKAN**

No.	Indikator	TK+RA/BA	SD+MI	SMP+MTs
1.	Persentase Lulusan TK/RA/BA			
3.	Persentase Akreditasi Sekolah			
	a. Akreditasi A		10,88	32,67
	b. Akreditasi B		49,71	33,66
	c. Akreditasi C		26,76	17,82
4.	Rata2 UASBN (SD)/UN			
5.	Angka lulusan		12983	10158
	a. Laki-laki		6622	5125
	b. Perempuan		6361	5033
6.	Angka Mengulang			
	a. Laki-laki		1026	43
	b. Perempuan		448	16
7.	Angka Putus Sekolah		36	47
	a. Laki-laki		21	28
	b. Perempuan		15	19
8.	% Kelayakan Guru Mengajar		88,13	92,70
	a. Guru S1 ke atas		88.13	92.70
	- Laki-laki	0	80,78	90,10
	- Perempuan	55,94	90,23	93,49
	b. Guru S1 ke bawah		11.87	7.30
	- Laki-laki	100	19,22	9,90
	- Perempuan	44,06	9,77	6,51

## TABEL

9.	% Guru tersertifikasi			
	a. Laki-laki		6,66	6,12
	b. Perempuan		29,69	30,18
10.	% Kepala sekolah tersertifikasi		100	100
	a. Laki-laki		58,41	66,33
	b. Perempuan		41,59	33,67
11.	Persentase Guru Bidang Studi		1504	
	a. Pend. Agama			
	b. PKN			
	c. Bhs Indonesia			
	d. Bhs Inggris			
	e. Matematika			
	f. IPA			
	f.1 Fisika			
	f.2 Kimia			
	f.3 Biologi			
	g. IPS			
	g.1 Sejarah			
	g.2 Geografi			
	g.3 Ekonomi			
	h. Seni Budaya			
	i. Penjas Orkes			
	j. Keterampilan			
	k. Muatan Lokal			
	l. BP			
	m. Kepala Sekolah			
	n. TIK			
	o. Keterampilan Bhs Asing			
	o. Sastra Indonesia			
	p. Bahasa Asing			
	q. Antropologi			

TABEL

12.	Persentase Kondisi Ruang Kelas			
	a. Baik	33,68	29,47	27,72
	b. Rusak Ringan	55,37	56,72	61,66
	c. Rusak Berat	10,95	13,81	10,61
13.	Persentase Fasilitas Sekolah			
	a. Perpustakaan	6,35	69,91	82,65
	b. Lapangan OR		100	100
	c. Ruang UKS		35,40	39,80
	d. Laboratorium			127,55
	e. Keterampilan			
	f. Bimbingan Penyuluhan			
	g. Serba Guna			
	h. Tempat Ibadah			
	i. Toilet	133,86	317,40	341,84
	j. Air Bersih			
	k. Listrik		97,35	97,96
14.	Angka Partisipasi Biaya (persen)			
	a. Pemerintah Pusat			
	b. Yayasan			
	c. Orang tua			
	d. Pemerintah Provinsi			
	e. Pemerintah Kabupaten/Kota			
	f. Lainnya			
15.	Satuan biaya (000 Rp.)			

**C. EFISIENSI INTERNAL PENDIDIKAN**

Untuk melihat efisiennya suatu sekolah dapat dilihat dari rata-rata lama belajar siswa, untuk tingkat SD seharusnya lama belajar sampai lulus atau disebut rata-rata lama belajar lulusan adalah 6 tahun dan tingkat SMP dan SM seharusnya 3 tahun sehingga tidak ada siswa yang mengulang atau putus sekolah. Rata-rata lama belajar lulusan ini yang paling penting untuk menentukan efisien tidaknya

## TABEL

suatu sekolah. Berdasarkan rata-rata lama belajar lulusan, ternyata yang kondisinya terbaik adalah pada tingkat SMP+MTs. Bila dilihat lama belajar putus sekolah, ternyata kondisi putus sekolah yang terburuk adalah pada tingkat SD+MI yaitu sebesar .... yang berarti hanya beberapa tahun sekolah telah mengalami putus sekolah. Di samping itu, rata-rata lama belajar kohort merupakan rata-rata dari lulusan dan putus sekolah

**SISWA TERBUANG DAN PUTUS SEKOLAH**

No.	Jenis Sekolah	Putus Sekolah	Bertahan dengan mengulang	Bertahan tanpa mengulang
1.	Tingkat SD			
	- Tingkat I	4	647	
	- Tingkat II	3	314	
	- Tingkat III	6	242	
	- Tingkat IV	8	172	
	- Tingkat V	12	96	
	- Tingkat VI	6	3	
2.	Tingkat SMP			
	- Tingkat I	0	34	
	- Tingkat II	2	23	
	- Tingkat III	4	2	

Efisien atau tidaknya suatu sekolah juga dapat dilihat dari tahun-siswa terbuang. Tahun-siswa terbuang dirinci menjadi tiga yaitu terbuang karena mengulang, putus sekolah dan gabungan antara mengulang dan putus sekolah. Tahun-siswa terbuang yang terbaik yang berarti nilainya mendekati 0 ada pada tingkat SMP+MTs. Bila dilihat tahun masukan per lulusan maka tingkat SD+MI memiliki nilai tertinggi jika dibandingkan dengan jenjang pendidikan lainnya. Demikian juga dengan rasio keluaran per masukan, nilai terbesar yaitu mendekati angka 1 terdapat pada tingkat SMP. Angka bertahan yang baik adalah 100 persen ada pada tingkat SD+MI, sedangkan koefisien efisiensi terbaik adalah 100 persen ada pada tingkat SMP+MTs sedangkan yang terburuk ada pada tingkat SD+MI. Angka bertahan sampai dengan tingkat 5 sebesar 99,72 nilai terbaik adalah 100 persen.

#### D. Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan

Pembangunan pendidikan adalah bidang pembangunan yang menempati posisi strategis bagi pengembangan sumber daya manusia berkualitas sebagai modal dasar pembangunan secara menyeluruh. Keberhasilan pembangunan pendidikan akan mampu memberikan kontribusi bagi terciptanya insan yang mandiri dan bermartabat. Oleh karena itu tugas utama pembangunan pendidikan adalah memberi kontribusi yang berarti bagi pemecahan permasalahan bangsa.

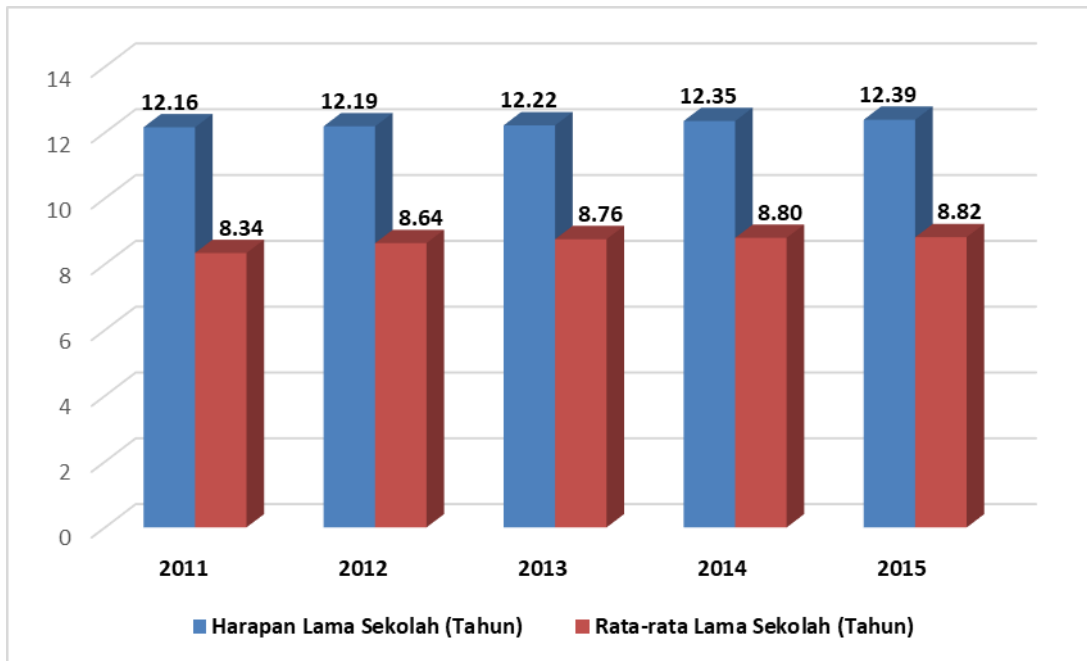
Pendidikan pada hakekatnya bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab.

Sejalan dengan tujuan tersebut Pemerintah Kabupaten Bengkalis bertekad mewujudkan insan yang bermoral, kompetitif dan berwawasan kebangsaan yang dibangun melalui pendidikan formal, informal dan pendidikan non formal yang dilaksanakan secara berkelanjutan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender.

Komponen pendidikan pada indikator harapan lama sekolah menunjukkan keterjaminan masyarakat di Kabupaten Bengkalis dapat bersekolah hingga jenjang menengah atas dengan besaran indikator 12,39 tahun pada akhir periode 2015. Namun keinginan masyarakat di Kabupaten Bengkalis terbilang cukup rendah untuk dapat bersekolah hingga jenjang menengah yang diperlihatkan kondisi indikator rata-rata lama sekolah masih belum mencapai jenjang pendidikan sembilan tahun atau sebesar 8,82 tahun hingga tahun 2015.

**Tabel 2.13**  
**Data IPM Komponen Pendidikan**  
**Kabupaten Bengkalis 2011-2015**

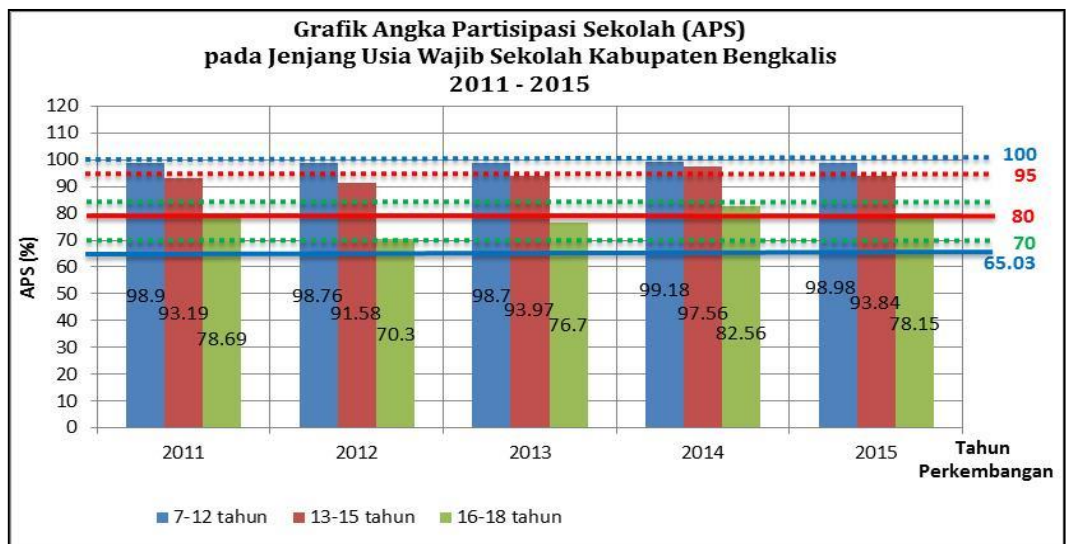
TABEL



Sumber: RPJMD Kabupaten Bengkulu 2016-2021 (diolah)

Selain angka melek huruf, indikator angka partisipasi sekolah (APS) dapat dijadikan sebagai ukuran keberhasilan kebijakan pembangunan pendidikan pada suatu daerah. APS merupakan ukuran terhadap daya serap sekolah terhadap penduduk usia sekolah atau dapat pula dikatakan sebagai kemampuan akses penduduk usia sekolah terhadap sarana dan prasarana pendidikan yang disediakan baik oleh pemerintah maupun swasta.

Berdasarkan definisi di atas maka APS dapat dibagi menjadi: APS usia 7-12 tahun, APS 13 -15 tahun dan APS 16 -18 tahun. Perkembangan capaian APS untuk setiap jenjang penduduk usia sekolah pada tahun 2011 - 2015 dapat pada gambar 2.15 berikut ini:



TABEL

Sumber: RPJMD Kabupaten Bengkalis 2016-2021

Grafik pada gambar di atas memperlihatkan secara umum bahwa daya serap lembaga pendidikan baik terhadap penduduk usia sekolah pada semua jenjang pendidikan yang disediakan oleh pemerintah maupun swasta belum dapat mencapai target akhir pembangunan periode 2011 - 2015.

Daya serap pada lembaga pendidikan setingkat pendidikan menengah dan perguruan tinggi masih cukup rendah dibandingkan target tahun 2015 yang menghendaki APS usia 16 - 18 tahun harus berada pada capaian 85 % dari penduduk usia sekolah pada jenjang tersebut. Sedangkan APS usia 7 - 12 tahun dan APS usia 13 - 15 tahun sudah menunjukkan capaian yang cukup baik namun belum dapat mencapai target dari APS yang hendak dicapai pada akhir periode pembangunan 2011 – 2015.

Keberhasilan pelayanan pada urusan pendidikan dapat dilihat pada enam indikator yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis sebagai ukurannya yaitu: Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), Rasio Guru terhadap Murid, Angka Putus Sekolah, Angka Melanjutkan (AM) dan Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV.

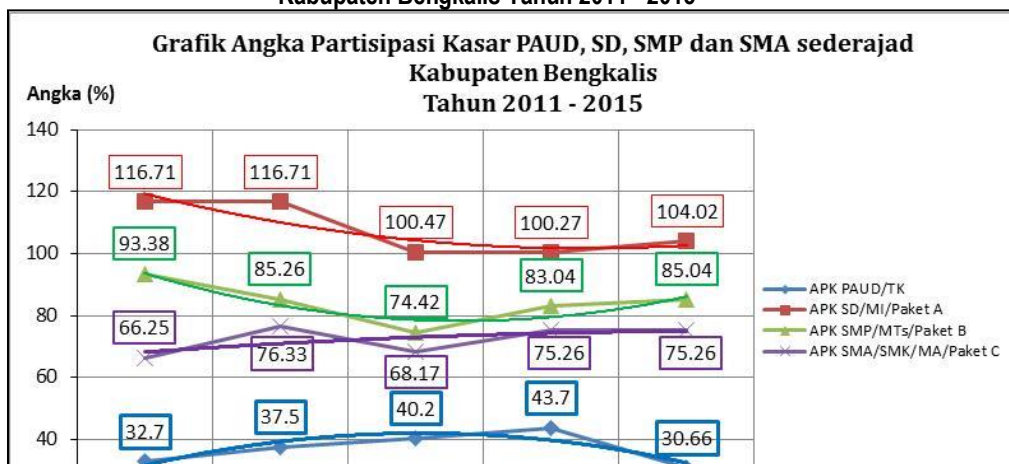
Keenam indikator yang diukur, maka terdapat lima indikator yang dinilai belum mencapai target akhir pembangunan 2015 yaitu: Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Putus Sekolah, Angka Melanjutkan (AM) dan Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV. Lima indikator tersebut, ada tiga indikator yang akan menjadi fokus dalam analisis ini, yaitu:

**a. Angka Partisipasi Kasar (APK)**

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah ukuran partisipasi penduduk dalam mengenyam pendidikan sesuai jenjang pendidikan ditempuh tanpa melihat batas usia sekolah yang diharuskan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

Grafik pada gambar 2.20 berikut ini memperlihatkan kondisi APK di Kabupaten Bengkalis pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyyah sederajat (SD/MI/Paket-A), Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah sederajat (SMP/MTs/Paket-B) dan Sekolah Menengah Atas dan Madrasah Aliyyah termasuk Sekolah Menengah Kejuruan sederajat (SMA/SMK/MA/Paket-C).

**Gambar 2.2**  
**Capaian APK pada Semua Jenjang Pendidikan**  
**Kabupaten Bengkalis Tahun 2011 - 2015**



*Sumber: RPJMD Kabupaten Bengkalis 2016-2021*

Berdasarkan grafik pada gambar di atas dapat dijelaskan bahwa capaian APK pada semua jenjang pendidikan belum mencapai target akhir pembangunan 2015. Capaian APK PAUD dan APK SD/MI/Paket-A menunjukkan kecenderungan memburuk diakhir tahun 2015.

APK PAUD yang ditargetkan dicapai pada angka 75 % hanya dapat dicapai 30,66 % pada akhir tahun 2015. Sekalipun capaian tahun 2015 sudah melebihi angka tahun dasar 2010 yaitu sebesar 21,01 %, namun secara umum menunjukkan adanya tren penurunan dalam kurun tahun 2011 - 2015.

Sedangkan APK SD/MI/Paket-A sudah melebihi angka 100 % menurut Standar Pelayanan Minimal Sekolah Dasar, namun dikarenakan target Pemerintah Daerah yang menghendaki peningkatan daya tampung sekolah dasar di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2015 sebesar 106,13 % maka capaian target APK SD/MI/Paket-A Kabupaten Bengkalis masih di bawah yang ditargetkan yaitu sebesar 104,02 % di tahun 2015, sehingga secara umum capaian APK SD/MI/Paket-A dapat dikatakan menuju perbaikan peningkatan, sekalipun tren nya sangat kecil.

Untuk APK SMP/MTs/Paket-B Kabupaten Bengkalis belum mencapai target akhir pembangunan 2010 - 2015 yaitu pada angka 103 % di tahun 2015, dimana APK SMP/MTs untuk tahun 2015 baru mencapai 85,04 %. Sedangkan tren pencapaian APK SMP/MTs/Paket-B cenderung mengalami perbaikan lebih baik dibandingkan dengan APK SD/MI/Paket-C dalam kurun waktu yang sama.

APK SMA/SMK/MA/Paket-C menunjukkan tren peningkatan yang cukup baik sekalipun belum dapat mencapai target akhir pembangunan 2010 - 2015 sebesar 100 %, dimana pada akhir tahun 2015 baru APK SMA/SMK/MA/Paket-C pada angka 75,26 %, namun masih lebih tinggi dari tahun dasar 2010 yaitu sebesar 62,41 %.



## TABEL

Jika APK digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan di suatu jenjang pendidikan tertentu tanpa melihat berapa usianya, maka Angka Partisipasi Murni (APM) mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu.

Kondisi capaian APM terhadap APK di Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada tabel 2.6 berikut ini:

**Tabel 2.14**  
**Capaian APM dan Perbandingan Terhadap Capaian APK**  
**Kabupaten Bengkalis Tahun 2011 – 2015**

INDIKATOR	Base Line 2010	2011	2012	2013	2014	2015	Target Akhir 2015
<b>APK SD/MI/Paket A</b>	<b>105,68</b>	<b>116,71</b>	<b>116,71</b>	<b>100,47</b>	<b>100,27</b>	<b>104,02</b>	<b>106,13</b>
APM SD/MI	98,19	99,25	97,65	98,76	96,14	95,24	100
<b>APK SMP/MTs/Paket B</b>	<b>86,89</b>	<b>93,38</b>	<b>85,26</b>	<b>74,42</b>	<b>83,04</b>	<b>85,04</b>	<b>103</b>
APM SMP/MTs	82,15	88,5	95,45	91,18	90	84,5	100
<b>APK SMA/SMK/MA/Paket C</b>	<b>62,41</b>	<b>66,25</b>	<b>76,33</b>	<b>68,17</b>	<b>75,26</b>	<b>75,26</b>	<b>100</b>
APM SMA/SMK/MA	59,77	64,00	97,49	70,3	73,60	71,7	95

Sumber: RPJMD Kabupaten Bengkalis 2016-2021

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat dijelaskan bahwa status capaian peningkatan APM sesuai target akhir RPJMD tahun 2010 - 2015 berkorelasi erat dengan capaian APK pada periode yang sama. Namun, proporsi anak yang bersekolah tepat waktu di Kabupaten Bengkalis khususnya pada jenjang SMP/MTs dan SMA/SMK/MA sudah lebih baik dari tahun dasar pembangunan 2010. Sedangkan proporsi anak yang bersekolah tepat waktu pada jenjang SD/MI masih menunjukkan kondisi yang belum membaik, ini diperlihatkan angka capaian APM SD/MI pada akhir tahun 2015 sebesar 95,24 % masih lebih kecil dibandingkan dengan tahun dasar 2010 sebesar 98,19 % dan target akhir RPJMD tahun 2010 - 2015 sebesar 95,24 %.

Indikasi terhadap status capaian APK dan APM tersebut disebabkan oleh: belum efektifnya *outcome* program dan *output* kegiatan yang direncanakan dan proporsi anggaran untuk urusan pendidikan masih diprioritaskan pada peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan yang ada di Kabupaten Bengkalis.

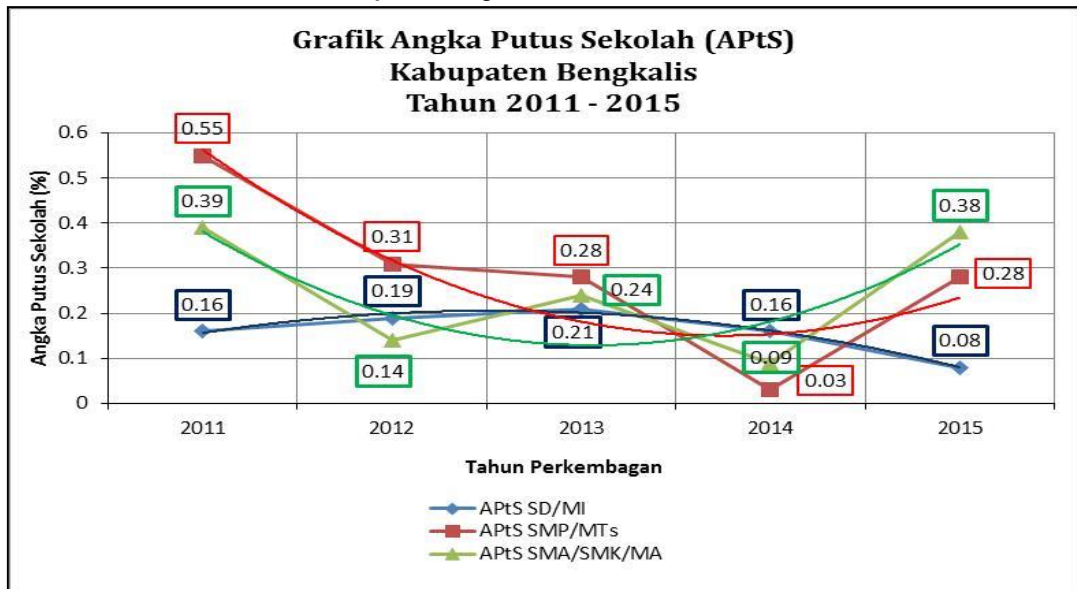
### **b. Angka Putus Sekolah (APtS)**

Angka putus sekolah (APtS) adalah proporsi anak menurut kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu.

Grafik pada gambar berikut ini memperlihatkan kondisi APtS di Kabupaten Bengkalis pada jenjang Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyyah (APtS SD/M), Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah

(APts SMP/MTs) dan Sekolah Menengah Atas dan Madrasah Aliyyah termasuk Sekolah Menengah Kejuruan (APts SMA/SMK/MA).

**Gambar 2.3**  
 Capaian APts pada Ketiga Jenjang Pendidikan  
 Kabupaten Bengkulu Tahun 2011 – 2015



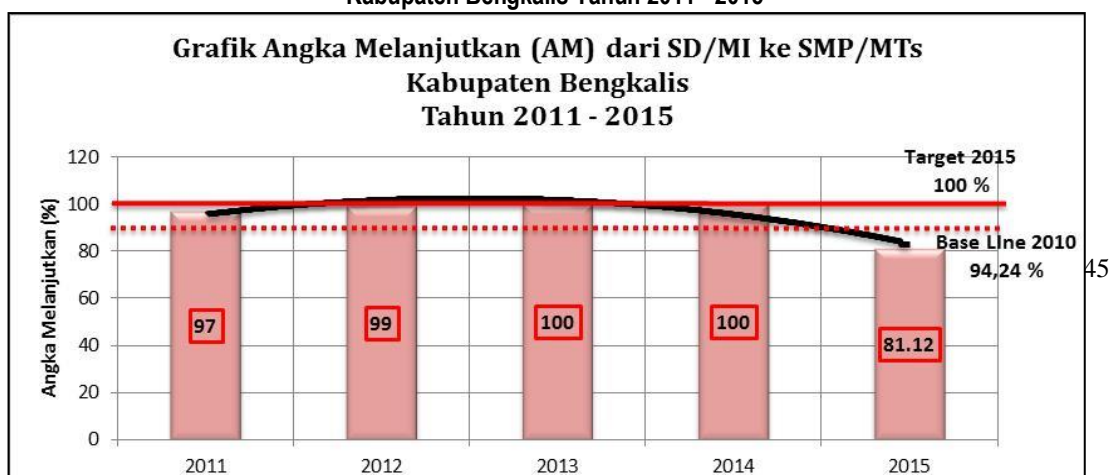
Sumber: RPJMD Kabupaten Bengkulu 2016-2021

Berdasarkan grafik pada gambar di atas dapat dijelaskan bahwa dari ketiga jenjang capaian APts menunjukkan APts SMP/MTs dan APts SMA/SMK/MA masih dibawah target akhir periode pembangunan 2010 - 2015 dengan kecenderungan tren perkembangan semakin memburuk dengan indikasi program dan kegiatan yang direncanakan tidak efektif untuk menurunkan APts pada kedua jenjang tersebut.

**c. Angka Melanjutkan (AM)**

Angka melanjutkan (AM) terdiri dari tiga sub indikator yaitu: Angka Melanjutkan dari TK/PAUD/Usia Sekolah ke SD/MI, Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs dan Angka Melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA. Capaian ketiga sub indikator tersebut adalah angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs masih belum dapat mencapai target akhir periode pembangunan 2010 - 2015. Kondisi capaian angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs diperlihatkan pada grafik gambar berikut ini

**Gambar 2.4**  
 Capaian Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs  
 Kabupaten Bengkulu Tahun 2011 - 2015



*Sumber: RPJMD Kabupaten Bengkalis 2016-2021*

Berdasarkan grafik di atas dapat dijelaskan capaian Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs menunjukkan tren penurunan dengan status cenderung memburuk. Dimana capaian angka melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs pada tahun 2015 sebesar 81,12 % masih di bawah target akhir periode pembangunan 2010 - 2015 yaitu sebesar 100 %. angka melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs pada tahun 2015 juga masih di bawah angka tahun dasar 2010 yang sebesar 94,24 %.

Permasalahan terhadap pencapaian target angka melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs juga dipengaruhi oleh indikator Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV yang masih belum mencapai target akhir pembangunan periode 2010 - 2015 sebesar 100 %, di mana guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV pada akhir tahun 2015 baru mencapai 97,98 %

## BAB V

### PENUTUP

#### A. *SIMPULAN*

Berdasarkan data yang terdapat dalam profil pendidikan dan kajian terhadap hasil indikator pendidikan seperti pemerataan, peningkatan mutu, relevansi, dan efisiensi internal pendidikan, maka dapat disimpulkan bahwa:

##### **1. DIPANDANG DARI SEGI PEMERATAAN**

Pemerataan yang dimaksud diukur dengan beberapa indikator yaitu APK, APM, perbandingan antarjenjang, rasio pendidikan, angka melanjutkan, tingkat pelayanan sekolah. Berdasarkan APK, maka angka yang tertinggi adalah pada jenjang SD, dilanjutkan dengan jenjang SMP, SM dan jenjang TK, sementara jenjang PAUD pemerataannya yang paling rendah. Rendahnya pemerataan ini adalah akibat jumlah peserta didik yang sedikit.

Sesuai dengan besarnya APK, maka besarnya APM juga mengikuti yaitu makin tinggi jenjang pendidikan makin rendah nilai APM.

Bila dilihat perbandingan antarjenjang, maka masih terjadi ketimpangan antara sekolah tingkat SD dengan tingkat SMP. Bila tingkat SMP harus sama dengan SD maka diperlukan tambahan sekolah sebesar.

Indikator tentang angka melanjutkan menunjukkan angka yang lebih besar pada jenjang SMP. Tingkat pelayanan sekolah yang paling tinggi terdapat di jenjang sekolah SMP.

## 2. DIPANDANG DARI SEGI PENINGKATAN MUTU

Peningkatan mutu dimaksud diukur dengan berbagai indikator yaitu persentase lulusan TK/RA/BA, angka mengulang, angka putus sekolah, angka lulusan, angka kelayakan guru mengajar, persentase kondisi ruang kelas, persentase fasilitas sekolah, angka partisipasi dari biaya, dan satuan biaya sekolah. Khusus untuk SMP ditambah dengan indikator kesesuaian guru mengajar menurut bidang studi.

Siswa baru SD dan MI yang berasal dari TK/RA/BA adalah sebesar ..... Angka mengulang yang terbesar terdapat pada tingkat SMP yaitu ..., sedangkan angka putus sekolah yang terbesar terdapat pada tingkat SMP yaitu ... dan angka lulusan yang terendah terdapat pada tingkat SMP. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tingkat SMP perlu ditangani lebih lanjut karena memiliki nilai yang negatif yang berarti mutunya kurang dibandingkan dengan jenjang lainnya.

Indikator kelayakan mengajar guru, ternyata di tingkat SMP guru yang layak mengajar paling besar yaitu ... persen dan yang paling rendah pada tingkat SD yaitu ....persen.

Kondisi ruang kelas terbaik terdapat pada tingkat SMP dan sebaliknya yang kondisinya rusak berat terbanyak terdapat pada tingkat SD. Dari fasilitas sekolah yang ada, masih ada sekolah yang belum memiliki perpustakaan yaitu .... persen di tingkat SD, ... persen di tingkat SMP, dan ... persen. Demikian juga dengan lapangan olahraga dan ruang UKS, masih ada beberapa sekolah yang belum memiliki yaitu ...persen di tingkat SD, ...persen di tingkat SMP, dan .....

Laboratorium yang harus dimiliki oleh semua SMP, pada kenyataannya masih ada sekolah yang belum memiliki yaitu ...persen.

Profil pendidikan Kabupaten Bengkalis tahun 2017 ini disusun berdasarkan analisa data yang terkumpul pada tabel profil pendidikan sebagaimana terlampir dan telah disesuaikan dengan aplikasi yang dibutuhkan untuk bahan penyusunan program pendidikan secara keseluruhan.

Muatan data yang ditampilkan adalah faktual sesuai adanya. Artinya data yang termuat dalam analisa profil pendidikan ini didapat dari sumber resmi yang saling terkait (memiliki relevansi) kepentingan dalam penyusunan program pendidikan. Alur pendataan yang telah dilakukan melalui tahapan-tahapan sesuai jadwal yang telah ditetapkan dan permanen secara nasional maupun daerah dari tahun ke tahun dan bersifat dinamis.

Semoga profil pendidikan Kabupaten Bengkalis ini dapat menampilkan data dan informasi secara menyeluruh tentang potret pembangunan pendidikan di Kabupaten Bengkalis, dan data yang sudah kami sajikan di dalamnya dapat menjadi bahan kajian, analisa, dalam mengambil kebijakan dan keputusan dalam perencanaan pembangunan pendidikan.



**Pemerintah Kabupaten Bengkalis  
Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis  
Tahun 2017**



